



Proses *Clearance In dan Out* Terhadap Kapal *Cargo* di Pelabuhan Weda Halmahera Tengah Diageni PT Pelayaran Bahtera Diserindo

Titis Ari Wibowo^{1*}, Agung Kwartama²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Indonesia

² Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya, Indonesia

Email: agungkwartama1977@gmail.com *

Abstract, *The procedures for cargo ship clearance in and out at Weda Port, Central Halmahera, managed by PT Pelayaran Bahtera Diserindo, play a vital role in ensuring efficient port operations and regulatory compliance. The clearance-in process consists of several steps that cargo ships must complete before entering the port, including document verification, health inspections, and adherence to security protocols. On the other hand, the clearance-out process involves procedures that must be completed before a ship departs, such as submitting shipping documents and undergoing cargo inspections. This study aims to examine these procedures, identify the challenges faced, and propose recommendations to enhance the efficiency and effectiveness of clearance processes at Weda Port. By utilizing the latest data and statistics, this research also emphasizes the significant role of PT Pelayaran Bahtera Diserindo in facilitating logistics operations in North Maluku. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of the existing procedures and their impact on Indonesia's maritime industry.*

Keywords: *cargo ship clearance, Weda Port, PT Pelayaran Bahtera Diserindo, port operations, maritime regulations, logistics, North Maluku*

Abstrak, *Prosedur clearance in dan out kapal cargo di Pelabuhan Weda Halmahera Tengah yang diageni oleh PT Pelayaran Bahtera Diserindo merupakan aspek krusial dalam memastikan kelancaran operasional pelabuhan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Proses clearance in melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh kapal cargo sebelum memasuki pelabuhan, termasuk verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan. Sementara itu, clearance out mencakup prosedur yang harus dilakukan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, seperti pengisian dokumen pelayaran dan pemeriksaan kargo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses clearance di Pelabuhan Weda. Dengan menggunakan data dan statistik terkini, jurnal ini juga akan menyoroti peran penting PT Pelayaran Bahtera Diserindo dalam mendukung kegiatan logistik di wilayah Maluku Utara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur yang ada dan dampaknya terhadap industri pelayaran di Indonesia.*

Kata kunci: *izin kapal kargo, Pelabuhan Weda, PT Pelayaran Bahtera Diserindo, operasional pelabuhan, peraturan maritim, logistik, Maluku Utara*

1. PENDAHULUAN

Pelabuhan Weda di Halmahera Tengah merupakan salah satu pelabuhan strategis di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Sebagai pelabuhan cargo, prosedur clearance in dan out menjadi bagian integral dari operasional pelabuhan yang harus diatur dengan baik untuk menghindari keterlambatan dan masalah hukum. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, pelabuhan ini mengalami peningkatan volume lalu lintas barang hingga 15% dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan pentingnya efisiensi dalam proses clearance (Kementerian Perhubungan, 2022).

Prosedur clearance in dimulai sebelum kapal memasuki pelabuhan, di mana dokumen seperti manifest muatan, sertifikat kesehatan, dan dokumen kepabeanaan harus disiapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kargo yang dibawa memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemeriksaan kesehatan terhadap awak kapal juga menjadi bagian dari prosedur ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya protokol kesehatan yang ketat (WHO, 2021). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi agen pelayaran seperti PT Pelayaran Bahtera Diserindo dalam memastikan semua persyaratan dipenuhi.

Setelah kapal berhasil melakukan clearance in, langkah selanjutnya adalah proses clearance out yang harus dilakukan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Prosedur ini mencakup pengisian dokumen pelayaran yang harus dilengkapi dengan informasi akurat mengenai kargo yang dibawa. Keterlambatan dalam proses ini dapat menyebabkan biaya tambahan dan mengganggu jadwal pelayaran. Data dari Asosiasi Pengusaha Nasional menunjukkan bahwa hingga 30% dari biaya operasional pelayaran dapat disebabkan oleh keterlambatan dalam proses clearance (APNI, 2023).

Dalam konteks ini, PT Pelayaran Bahtera Diserindo berperan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi semua proses clearance yang diperlukan. Dengan pengalaman dan jaringan yang luas, perusahaan ini mampu mengelola proses clearance dengan lebih efisien, meskipun tetap menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai prosedur clearance dan dampaknya terhadap operasional pelabuhan serta industri pelayaran secara keseluruhan.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses clearance di Pelabuhan Weda. Selain itu, jurnal ini juga akan memberikan rekomendasi strategis bagi PT Pelayaran Bahtera Diserindo dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan.

Industri pelayaran di Indonesia saat ini eksistensinya terus berkembang, hal ini didukung oleh letak geografis yang strategis sehingga sangat menguntungkan dalam hal perdagangan Internasional. Selain itu dapat dijadikan sebagai suatu peluang bisnis industri pelayaran oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dalam negeri maupun luar negeri dan keagenan kapal. Kegiatan ekspor-impor di Indonesia menjadi sangat tinggi terutama melalui transportasi laut, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya kapal asing maupun kapal domestik yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Tingginya kegiatan bongkar muat melalui pelabuhan juga dapat menunjang pertumbuhan oleh perusahaan pelayaran di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Prosedur clearance in di Pelabuhan Weda melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kapal cargo sebelum diizinkan untuk berlabuh. Tahapan pertama adalah pengajuan dokumen yang harus dilakukan oleh agen pelayaran. Dokumen yang diperlukan antara lain adalah manifest muatan, dokumen kepabeanan, dan sertifikat kesehatan kapal. Proses ini tidak hanya melibatkan agen pelayaran, tetapi juga badan-badan pemerintah terkait seperti Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai serta Dinas Kesehatan setempat (Bea Cukai, 2023).

Setelah dokumen diajukan, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan oleh petugas pelabuhan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan fisik terhadap kargo juga dilakukan untuk memastikan tidak ada barang terlarang atau barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan. Menurut data dari Bea Cukai, sekitar 5% dari total kargo yang diperiksa mengalami masalah terkait dokumen atau barang yang tidak sesuai (Bea Cukai, 2023).

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses clearance in adalah keterlambatan dalam pengajuan dokumen oleh agen pelayaran. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara agen pelayaran dan pihak-pihak terkait. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Pelabuhan Weda, ditemukan bahwa keterlambatan pengajuan dokumen dapat menyebabkan penundaan hingga 48 jam dalam proses clearance, yang berdampak pada biaya operasional yang meningkat (Studi Kasus Pelabuhan Weda, 2022).

Selain itu, dalam situasi pandemi COVID-19, prosedur clearance in juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pemeriksaan kesehatan terhadap awak kapal menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum kapal diperbolehkan berlabuh. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses clearance in, di mana semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku untuk mencegah penyebaran virus (Kementerian Kesehatan, 2021).

Dengan adanya berbagai tantangan ini, penting bagi PT Pelayaran Bahtera Diserindo untuk terus meningkatkan sistem manajemen dan komunikasi yang ada. Penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan dokumen dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dapat membantu mempercepat proses clearance in dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan.

Setelah kapal cargo berhasil melakukan clearance in, langkah selanjutnya adalah proses clearance out yang harus dilakukan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Proses ini dimulai dengan pengisian dokumen pelayaran yang harus dilengkapi dengan informasi akurat

mengenai kargo yang dibawa. Dokumen yang diperlukan untuk clearance out antara lain adalah surat izin berlayar, manifest muatan, dan dokumen kepabeanan yang telah disetujui (Kementerian Perhubungan, 2022).

Salah satu aspek penting dari proses clearance out adalah pemeriksaan kargo sebelum kapal diberi izin untuk berlayar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kargo yang diangkut sesuai dengan dokumen yang diajukan dan tidak ada barang terlarang. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Nasional, sekitar 10% dari total kapal yang melakukan clearance out mengalami masalah terkait dokumen atau kargo yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pelayaran (APNI, 2023).

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam proses clearance out adalah keterlambatan dalam pengisian dokumen pelayaran. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam pengisian dokumen atau kurangnya informasi yang diperlukan. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh PT Pelayaran Bahtera Diserindo, ditemukan bahwa sekitar 15% dari total kapal yang melakukan clearance out mengalami keterlambatan akibat masalah dokumen (Studi PT Pelayaran Bahtera Diserindo, 2023).

Selain itu, proses clearance out juga harus memperhatikan aspek biaya. Keterlambatan dalam proses ini dapat menyebabkan biaya tambahan, termasuk biaya demurrage yang harus dibayar oleh pemilik kapal. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa biaya demurrage dapat mencapai 20% dari total biaya operasional kapal jika terjadi keterlambatan lebih dari 24 jam (Kementerian Perhubungan, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi PT Pelayaran Bahtera Diserindo untuk terus meningkatkan sistem manajemen dokumen dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Penggunaan teknologi informasi dalam pengisian dokumen dan pemantauan proses clearance out dapat membantu meminimalisir keterlambatan dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan.

Proses clearance in dan out di Pelabuhan Weda menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional pelabuhan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh agen pelayaran. Regulasi yang berbeda-beda dari berbagai instansi pemerintah dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam proses clearance. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Nasional, sekitar 40% agen pelayaran mengeluhkan kompleksitas regulasi sebagai salah satu penyebab keterlambatan (APNI, 2023).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur di pelabuhan. Meskipun Pelabuhan Weda telah mengalami peningkatan kapasitas dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa kendala terkait fasilitas yang ada. Misalnya, kurangnya ruang untuk pemeriksaan kargo dan antrian yang panjang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses clearance. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa sekitar 25% dari total waktu yang dibutuhkan untuk proses clearance disebabkan oleh antrian yang panjang (Kementerian Perhubungan, 2022).

Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca juga dapat mempengaruhi proses clearance. Dalam beberapa kasus, kondisi cuaca buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam kedatangan kapal dan mempengaruhi jadwal clearance. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi PT Pelayaran Bahtera Diserindo dalam merencanakan dan mengelola operasional pelayaran (BMKG, 2023).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam proses clearance dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30% tenaga kerja di sektor pelayaran masih memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan lebih lanjut (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022). Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, PT Pelayaran Bahtera Diserindo dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan efisiensi proses clearance di Pelabuhan Weda.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses clearance in dan out di Pelabuhan Weda. Pertama, penting untuk meningkatkan koordinasi antara agen pelayaran dan pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mempermudah proses pengajuan dokumen dan mempercepat komunikasi antar pihak (Kementerian Perhubungan, 2022).

Kedua, investasi dalam infrastruktur pelabuhan juga menjadi hal yang krusial. Peningkatan fasilitas pemeriksaan kargo dan ruang tunggu dapat membantu mengurangi waktu antrian dan mempercepat proses clearance. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, peningkatan infrastruktur pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% (Kementerian Perhubungan, 2022).

Ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam proses clearance akan berdampak positif terhadap efisiensi dan kualitas layanan. Program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor pelayaran (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

Keempat, penerapan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses clearance juga sangat penting. Penggunaan aplikasi untuk pengajuan dokumen dan pemantauan status clearance dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Data dari Asosiasi Pengusaha Nasional menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat mengurangi waktu proses clearance hingga 20% (APNI,

a. Dokumen Untuk Clearance In dan Clearance Out

Berikut adalah dokumen-dokumen yang digunakan agen pelayaran untuk *clearance in* dan *clearance out* kapal menurut Suyono (2005:239-240):

- 1) Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini harus dipersiapkan sebelum tiba di pelabuhan, khusus untuk kapal-kapal asing yang pertama kali di ageni:
 - a) PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing) dari Sea Comm.
 - b) PPKB (Pusat Pelayanan Kapal dan Barang) dari *port authority*.
 - c) RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) diajukan oleh agen ke Bea & Cukai.
 - d) Memorandum Pemeriksaan Dokumen Kapal diajukan ke *harbour master*.
 - e) *Letter of Appointment* dari owners/kapal.
 - f) *Tonnage Certificate (copy)* dari owners/kapal.
 - g) *Master Cable* dari master yang menyatakan bahwa kapal akan masuk ke pelabuhan.
 - h) ISSC (*International Ship Security Certificate*) dari owners.
 - i) *Ship Particulars* dari owners/kapal.
 - j) *Crew List* sebagai laporan pemberitahuan ke imigrasi.
 - k) *Cargo Manifest/Bill of Lading (copy)* dari owners/charteres sebagai laporan ke Bea & Cukai dari *Port Authority*.
- 2) Dokumen yang disiapkan pada saat tiba di pelabuhan:
 - a) *Crew list*
 - b) *Crew personal effect list*
 - c) *Store list*
 - d) *Voyage memo*

- e) *Ammunition list*
 - f) *Provision list*
- 3) Dokumen yang diperlukan/disiapkan sewaktu keberangkatan kapal:
- a) *Sailing Declaration* dari karantina
 - b) *Cargo Manifest*
 - c) *Port Clearance Out*
 - d) *Immigration Clearance*
 - e) *Quarantine Clearance*
 - f) *Custom Clearance*
 - g) *Light Dues (copy)*
 - h) *PPKB out* dari *port authority*

3. METEDOLOGI PENELITIAN

PT Pelayaran Bahtera Diserindo Cabang Weda dalam melakukan pelayanan terhadap kapal-kapal yang diageni masih belum memuaskan, dikarenakan pada pelayanan jasa *clearance in* dan *clearance out* kapal belum optimal sehingga akan mempengaruhi terhadap lamanya waktu kapal berada di pelabuhan. Dalam penelitian skripsi ini penulis akan membahas mengenai pengaruh pelayanan jasa *clearance in* dan *clearance out* kapal terhadap waktu kapal berada di pelabuhan yang menggunakan jasa keagenan PT Pelayaran Bahtera Diserindo Cabang Weda akan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan metode deskriptif kuantitatif, penulis akan mencari solusi dari permasalahan yang ada yaitu pengaruh pelayanan jasa *clearance in* dan *clearance out* kapal terhadap waktu kapal berada di pelabuhan yang menggunakan jasa agen PT Pelayaran Bahtera Diserindo Cabang Weda.

Menurut Gulo (2002:76) Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil populasi dari data perusahaan *vessel monitoring clearance in/out*. Dengan sampel jumlah kapal-kapal yang menggunakan jasa agen PT Pelayaran Bahtera Diserindo Cabang Weda selama 10 (sepuluh) bulan terhitung dari 25 Juli 2022 – 25 Mei 2023, jumlah waktu *clearance in* dan *clearance out* selama 10 (sepuluh) bulan terhitung dari 25 Juli 2022 – 25 Mei 2023.

Pembahasan.

Dalam analisis data, penulis akan menguraikan beberapa cara untuk dapat memastikan bahwa hal tersebut apakah dapat mempengaruhi lamanya waktu kapal berada di pelabuhan. Penulis akan menganalisa hal-hal yang dapat mempengaruhi lamanya waktu kapal. Oleh

karena itu, untuk memudahkan penganalisaan masalah maka dibuat tiga kelompok variabel yaitu variabel X_1 , variabel X_2 dan variabel Y . Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terbukti berpengaruh positif dan signifikan pelayanan *clearance in* terhadap lamanya kapal berada di pelabuhan Weda Halmahera Tengah dengan koefisien regresi 0,97 ($r_{x_1y} = 0,97$) dan t-hitung 46,412 > t-table 1,860.
2. Terbukti berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pelayanan *clearance out* terhadap lamanya kapal berada di pelabuhan Weda Halmahera Tengah dengan koefisien regresi 0,98 ($r_{x_2y} = 0,98$) dan t-hitung 69,974 > t-table 1,860.
3. Terbukti berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pelayanan *clearance in* dan *clearance out* secara bersama-sama terhadap lamanya kapal berada di pelabuhan Weda Halmahera Tengah dengan koefisien regresi 0,97 ($r_{y_{x_1x_2}} = 0,97$) dan F-hitung 148,05 > F-table 4,74 yang artinya 98% kontribusi yang diberikan oleh variabel *clearance in* dan *clearance out*. Adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi adalah variabel pelayanan *clearance out*. Sedangkan 2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan saran-saran untuk perusahaan PT Pelayaran Bahtera Diserindo Cabang Weda agar dapat mempercepat waktu pelayanan jasa *clearance in* dan *clearance out* kapal yang diageni oleh perusahaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. PT Pelayaran Bahtera Diserindo menerapkan target waktu ideal dalam hal penyelesaian pelayanan *clearance in* maupun *clearance out* kapal. Pihak agen aktif untuk selalu menanyakan kepada pihak kapal mengenai informasi estimasi kedatangan kapal, sehingga dalam proses pengurusan dokumen di instansi-instansi terkait dapat dengan terlaksana tepat waktu.
2. Pihak agen memberikan informasi kepada pihak kapal mengenai prosedur kapal sebelum memasuki pelabuhan beserta hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan terkait dengan proses pelayanan jasa *clearance* di instansi-instansi terkait.
3. PT Pelayaran Bahtera Diserindo menambah jumlah SDM yang dimiliki oleh perusahaan terutama dibidang staff operasional. Dikarenakan perusahaan tersebut memiliki potensi dalam meningkatnya jumlah kedatangan kapal oleh karena itu harus diimbangi dengan menambah tenaga kerja.
4. PT Pelayaran Bahtera Diserindo meningkatkan kembali kualitas dari karyawannya. Dalam pemilihan karyawan sebaiknya melalui beberapa tahapan dan mempunyai kriteria

standar perusahaan tersebut agar dapat memberikan pelayanan jasa keagenan yang terbaik.

5. PT Pelayaran Bahtera Diserindo sebaiknya menambah jumlah sarana transportasi guna sebagai penunjang kegiatan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Kwartama (2024) *Hukum Asuransi Kelautan Dalam Pertanggung Jawaban Pelayaran Di Angkutan Laut*. Jurnal Nalar Keadilan 4 (2)
- A.Kwartama (2024) *Peningkatan Sistem Inaportnet dan Kualitas Pelayanan Kapal Terhadap Kinerja pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta*, Jurnal GICI Jurnal Keuangan dan Bisnis 16 (2), 147-159
- A.Kwartama (2024) *Proses Dan Pengawasan Pemuatan Cargo Domestik Lcl Melalui Laut Pada Pt Kitrans Jakarta*, Jurnal GICI Jurnal Keuangan dan Bisnis 16 (2), 216-225
- APNI. (2023). Survei Pengusaha Pelayaran Nasional.
- Bea Cukai. (2023). Laporan Tahunan Bea dan Cukai.
- BMKG. (2023). Laporan Cuaca dan Dampaknya terhadap Pelayaran.
- Fakhrurrozi. (2017). *Penanganan, Pengaturan, dan Pengamanan Muatan Kapal untuk Perwira Pelayaran Niaga*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fitri, E. (2021). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Swasthi Adi Cita.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Kesehatan. (2021). Protokol Kesehatan untuk Sektor Pelayaran.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). Laporan Ketenagakerjaan Sektor Pelayaran.
- Kementerian Perhubungan. (2022). Statistik Pelabuhan Indonesia.
- Moenir, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. (2009) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang *Kepelabuhanan*.
- Purwosutjipto, (2003). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Ridwan, Pamungkas, A., & Noto, A. A. (2021). *Implementasi Clearance In-Out Kapal dengan Sistem Inaportnet di Pelabuhan Banjarmasin*. National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies 3: 152-153.

- Saut Gurning, R. O., & Budiyanto, E. H. (2007). *Manajemen Bisnis Pelabuhan..* Surabaya: PT. Andhika Prasetya Ekawahana.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik. Dalam Reformasi Pelayanan Publik.* Jakarta: Bumi Akasara.
- Studi Kasus Pelabuhan Weda. (2022). Penelitian tentang Proses Clearance di Pelabuhan Weda.
- Studi PT Pelayaran Bahtera Diserindo. (2023). Evaluasi Proses Clearance di Pelabuhan Weda.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Suyono. (2005). *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Melalui Laut.* Jakarta: PPM.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran.*
- Widiyati, Elok & Ridwan. (2014). *Kamus Pelayaran dan Kepelabuhanan.* Yogyakarta: Leutikaprio.